

PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI EKSTERNALITAS

Dian Sagita Puji Arini¹, Hendra Riofita²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: dynsgta3@gmail.com¹, hendrariofita@yahoo.com²

Abstrak – Eksternalitas merupakan dampak dari aktivitas ekonomi yang tidak tercermin dalam mekanisme harga pasar, baik yang memberikan manfaat (positif) maupun menimbulkan kerugian (negatif) kepada pihak ketiga. Fenomena ini menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pasar, di mana alokasi sumber daya menjadi tidak efisien secara sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang dapat menginternalisasi eksternalitas di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan lembaga pemerintah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah telah menggunakan berbagai instrumen seperti regulasi, pajak, subsidi, serta penyediaan langsung barang dan jasa publik untuk mengelola eksternalitas. Meski demikian, efektivitas kebijakan sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kebijakan dalam menangani eksternalitas secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Eksternalitas, Kebijakan Publik, Kegagalan Pasar, Regulasi, Keberlanjutan.

Abstract – Externalities are the impacts of economic activities that are not reflected in the market price mechanism, whether they provide benefits (positive) or cause losses (negative) to third parties. This phenomenon is one of the main causes of market failure, where the allocation of resources becomes socially inefficient. This study aims to analyze the role of the government in designing and implementing public policies that can internalize externalities in Indonesia. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection through literature studies of various scientific literature, policy documents, and reports from related government agencies. The results of the study show that the government has used various instruments such as regulations, taxes, subsidies, and direct provision of public goods and services to manage externalities. However, the effectiveness of policies is often hampered by weak supervision, budget constraints, and lack of public participation. Therefore, efforts are needed to strengthen institutional capacity, cross-sector collaboration, and the use of digital technology to increase transparency and efficiency of policies in dealing with externalities in a sustainable manner.

Keywords: Externalities, Public Policy, Market Failure, Regulation, Sustainability.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi pasar, keputusan produksi dan konsumsi biasanya didasarkan pada mekanisme harga yang mencerminkan permintaan dan penawaran. Namun, tidak semua dampak dari aktivitas ekonomi tercermin dalam harga pasar. Ketika aktivitas suatu pihak menimbulkan dampak terhadap pihak lain tanpa kompensasi atau perhitungan dalam transaksi pasar, hal ini disebut eksternalitas. Eksternalitas dapat bersifat negatif, seperti polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik, atau positif, seperti manfaat sosial dari vaksinasi massal. Keberadaan eksternalitas inilah yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar, yaitu kondisi di mana alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dari sudut pandang sosial.

Kegagalan pasar akibat eksternalitas menuntut intervensi dari pemerintah untuk memperbaiki distribusi sumber daya dan menginternalisasi dampak sosial-ekonomi yang tidak tercermin dalam mekanisme pasar. Peran pemerintah menjadi sangat penting, baik dalam mengendalikan eksternalitas negatif yang merugikan masyarakat maupun dalam mendorong eksternalitas positif yang menguntungkan publik secara luas. Melalui kebijakan fiskal, regulasi, insentif, hingga penyediaan layanan publik, pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam berbagai bentuk peran kebijakan pemerintah dalam menangani eksternalitas, sekaligus menelaah efektivitas intervensi tersebut dalam konteks ekonomi modern.

Penulisan ini bertujuan untuk membahas secara mendalam bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi intervensinya dalam menangani eksternalitas, serta menilai berbagai kebijakan yang telah diterapkan dari perspektif efektivitas dan efisiensi. Kajian ini penting untuk memberikan landasan akademik sekaligus masukan kebijakan dalam upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial serta lingkungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi peran kebijakan pemerintah dalam merespons permasalahan eksternalitas di Indonesia. Data yang dianalisis bersumber dari literatur sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap publikasi ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan resmi dari lembaga-lembaga pemerintah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Eksternalitas dan Dampaknya

a. Eksternalitas Negatif

Eksternalitas negatif terjadi ketika aktivitas ekonomi menghasilkan dampak merugikan bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut, tanpa adanya kompensasi. Contoh klasik dari eksternalitas negatif adalah polusi udara dan pencemaran air yang ditimbulkan oleh industri. Dampak negatif ini dapat mencakup penurunan kualitas kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, dan peningkatan biaya sosial yang tidak tercermin dalam harga pasar.

Beberapa penelitian yang mengkaji dampak eksternalitas negatif antara lain:

1. PT. Eratex Djaja Probolinggo: Penelitian ini menemukan bahwa industri tekstil ini menyebabkan kemacetan akibat arus pergantian shift karyawan yang jumlahnya ribuan, serta penumpukan sampah akibat adanya pasar di belakang pabrik. Dampak negatif ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.
2. PT. Kebun Tebu Mas Lamongan: Studi ini menunjukkan bahwa pabrik gula ini menghasilkan eksternalitas negatif berupa pencemaran udara dan air, yang mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

b. Eksternalitas Positif

Sebaliknya, eksternalitas positif terjadi ketika aktivitas ekonomi memberikan manfaat bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut, tanpa adanya pembayaran. Contoh eksternalitas positif meliputi vaksinasi massal yang mengurangi penyebaran penyakit, pendidikan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang mempermudah aksesibilitas. Beberapa contoh dampak eksternalitas positif yang telah diteliti antara lain:

1. Perkebunan Apel di Batu, Jawa Timur: Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan perkebunan apel meningkatkan pendapatan petani dan membuka lapangan kerja baru, serta berkontribusi pada pendapatan daerah melalui pajak dan sektor pariwisata .
2. Sentra Wisata Kuliner Bratang Surabaya: Studi ini menunjukkan bahwa keberadaan sentra kuliner ini menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pedagang, dan menarik wisatawan, meskipun juga menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran udara dan kemacetan .
3. Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas yang dirasakan oleh pihak lain di luar aktivitas itu sendiri. Contohnya, dalam jurnal "Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan BP2T Provinsi Riau", pelayanan publik yang prima menciptakan eksternalitas positif, yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas seperti kemudahan berusaha, efisiensi waktu, dan meningkatnya kepercayaan pada lembaga pemerintah, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam proses perizinan.
4. Jurnal "Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech" membahas bagaimana persepsi peluang dan pengendalian risiko memengaruhi keinginan pelaku UMKM Muslim untuk merekomendasikan penggunaan fintech syariah, penelitian ini memiliki kaitan erat dengan konsep eksternalitas positif. Penggunaan fintech syariah oleh UMKM tidak hanya memberi manfaat pada pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat sekitar. Akses ke pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai prinsip syariah mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Dampak-dampak tersebut merupakan manfaat sosial yang dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi fintech, sehingga mencerminkan adanya eksternalitas positif dari adopsi teknologi keuangan syariah.

B. Peran Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Eksternalitas

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatasi eksternalitas yang tidak dapat diselesaikan secara efisien oleh mekanisme pasar. Intervensi kebijakan publik bertujuan untuk menginternalisasi dampak eksternalitas agar pelaku ekonomi mempertimbangkan konsekuensi sosial dari aktivitasnya. Berikut adalah beberapa bentuk peran kebijakan pemerintah yang umum diterapkan:

1. Pengenaan Pajak (Pajak Pigouvian)

Pengenaan pajak atas aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif merupakan salah satu instrumen kebijakan yang efektif. Pajak Pigouvian dikenakan agar biaya sosial yang timbul akibat aktivitas tersebut tercermin dalam biaya produksi atau konsumsi. Dengan mekanisme ini, pelaku usaha terdorong untuk mengurangi dampak negatifnya atau mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Studi empiris menunjukkan bahwa pajak karbon mampu mengurangi emisi gas rumah kaca di beberapa negara maju, meskipun implementasinya membutuhkan sistem pengawasan yang ketat.

2. Regulasi dan Standar Hukum

Pemerintah dapat menetapkan regulasi yang membatasi atau melarang praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Regulasi ini dapat berupa batas maksimum emisi, standar kualitas udara dan air, serta larangan penggunaan bahan berbahaya. Selain

memberikan kepastian hukum, regulasi juga berfungsi sebagai sinyal yang mendorong pelaku usaha beradaptasi dengan praktik produksi yang lebih bertanggung jawab. Di Indonesia, misalnya, regulasi mengenai limbah industri dan pengelolaan sampah telah menjadi instrumen penting dalam pengendalian pencemaran.

3. Sistem Kuota dan Perdagangan Izin Emisi (Cap and Trade)

Sistem cap and trade menetapkan batas emisi yang diperbolehkan secara keseluruhan, lalu mendistribusikan izin emisi kepada pelaku usaha. Perusahaan yang mampu menekan emisinya di bawah kuota dapat menjual izin kelebihan tersebut ke perusahaan lain. Sistem ini mengkombinasikan pengaturan kuantitatif dengan mekanisme pasar, sehingga efisiensi pengurangan emisi dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah. Meski belum luas diterapkan di Indonesia, cap and trade telah sukses digunakan di beberapa negara sebagai alternatif pengendalian polusi.

4. Subsidi dan Insentif untuk Eksternalitas Positif

Untuk mendorong aktivitas yang memberikan manfaat sosial, pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif. Subsidi pendidikan, vaksinasi, dan riset teknologi hijau merupakan contoh kebijakan yang dapat memperbesar manfaat eksternalitas positif. Dengan subsidi, biaya produksi atau konsumsi berkurang, sehingga lebih banyak individu atau perusahaan yang termotivasi untuk melakukan aktivitas tersebut.

5. Penyediaan Barang dan Layanan Publik

Sektor swasta seringkali kurang termotivasi untuk menyediakan barang atau jasa yang berdampak positif secara sosial, terutama jika keuntungan finansialnya rendah. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan barang dan layanan publik seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan infrastruktur transportasi. Penyediaan ini memastikan akses yang merata dan manfaat sosial yang maksimal.

6. Kampanye, Edukasi, dan Kemitraan

Selain kebijakan fiskal dan regulasi, pemerintah juga menjalankan kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak eksternalitas. Kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai atau promosi gaya hidup sehat merupakan contoh intervensi non-finansial yang efektif. Selain itu, kemitraan antara pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat memperkuat implementasi program-program yang mendukung pengelolaan eksternalitas.

KESIMPULAN

Eksternalitas, baik negatif maupun positif, merupakan fenomena yang sering terjadi dalam aktivitas ekonomi dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Pasar bebas tidak selalu mampu mengatasi dampak eksternal tersebut secara optimal, sehingga peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menginternalisasi biaya sosial dan mendorong manfaat sosial yang lebih luas.

Pemerintah dapat mengambil berbagai kebijakan seperti pengenaan pajak Pigouvian, regulasi ketat, sistem kuota dan perdagangan izin emisi, subsidi, serta penyediaan barang dan jasa publik untuk menangani eksternalitas. Selain itu, kampanye edukasi dan kemitraan lintas sektor turut memperkuat efektivitas intervensi pemerintah.

Di Indonesia, meskipun telah banyak kebijakan yang diterapkan untuk mengendalikan eksternalitas, terutama di bidang lingkungan dan sosial, masih terdapat tantangan dalam implementasi yang berkaitan dengan koordinasi antar lembaga, pengawasan, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar penanganan eksternalitas dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, L., & Susanto, H. (2021). Kampanye Pengurangan Sampah Plastik di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Indonesia Bersih. *Jurnal Lingkungan dan Masyarakat*, 5(1), 90-102.
- Hadiyanto, B., Prasetyo, L., & Santoso, B. (2019). Insentif Energi Terbarukan dan Peran Pemerintah dalam Mendorong Ekonomi Hijau. *Jurnal Teknologi Industri*, 11(2), 112- 123.
- Riofita, H. (2018). Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 2(1), 29–48.
- Riofita, H. (2024). Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151.
- Riofita, H.(2022). Developing digital empowerment programs to enhance the marketing performance of private Islamic higher education institution.1,2
- Sari, D., & Kartika, Y. (2021). Dampak Program KIP dan KIS terhadap Akses Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(3), 45-59.
- Setyawan, A., Nugroho, H., & Lestari, R. (2020). Implementasi Pajak Karbon untuk Pengendalian Polusi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Energi dan Lingkungan*, 4(1), 23- 34.
- Tietenberg, T. (2006). Tradable Permits and Pollution Control: Lessons for Climate Change. *Climate Policy*, 6(1), 31-41.
- Wahyuningrum, D., & Dwianti, R. (2018). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 150-161.